

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), merupakan sarana yang memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung. Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2021; Majelis Permusyawaratan Rakyat, n.d.; Miriam Budiardjo, 2008). Melalui penyelenggaraan Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan legitimasi dan mandat politik kepada pemimpin yang dipilih guna menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi publik.

Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan secara berkesinambungan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam memelihara kualitas demokrasi sekaligus meningkatkan legitimasi terhadap pemerintahan yang dihasilkan (Samuel P. Huntington, 1991). Di samping itu, Pemilu juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas politik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja para pemimpin dan menentukan pilihan politiknya kembali pada periode berikutnya (Joseph A. Schumpeter, 1942). Oleh karena itu, Pemilukada tidak hanya berperan sebagai mekanisme pergantian dan distribusi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dalam sistem demokrasi.

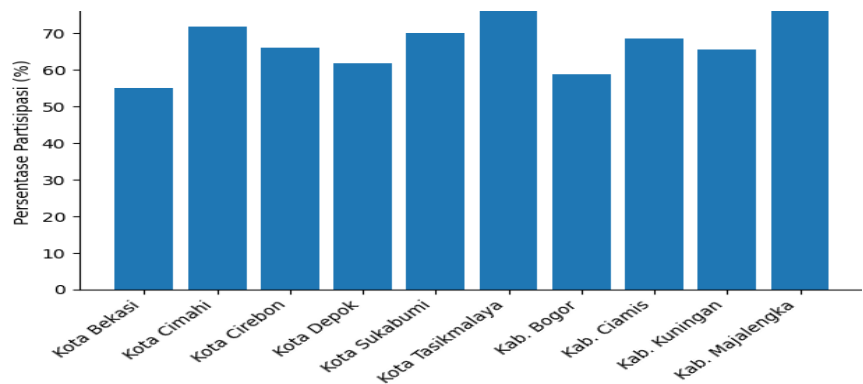
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai kualitas kehidupan demokrasi suatu negara. Tingginya angka partisipasi menunjukkan adanya kesadaran politik serta keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik (Arend Lijphart, 1997). Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi dapat menjadi indikasi adanya berbagai permasalahan

dalam sistem politik, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik atau rendahnya pemahaman mengenai pentingnya Pemilu. Menurut Almond dan Verba, partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam lingkungan sosial. Sementara itu, Budiardjo menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk perilaku pemilih yang rasional serta bertanggung jawab ketika menentukan pilihan politik yang akan diambil (Gabriel Almond and Sidney Verba., 1963; Miriam Budiardjo, 2008)

Dalam pelaksanaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan teknis pemilihan, melainkan juga sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi (Republik Indonesia, 2017). Kegiatan sosialisasi pemilu dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tahapan pemilihan, prosedur pelaksanaan, serta pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk partisipasi politik warga negara. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang optimal, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai sehingga terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses Pemilu (Ermila Rustiani Andolo, 2022; Komisi Pemilihan Umum, 2017).

Meskipun demikian, tingkat partisipasi pemilih di sejumlah daerah masih menunjukkan kondisi yang belum maksimal. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Kota Bekasi. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi tercatat mencapai 55,05 persen. Angka tersebut merupakan salah satu tingkat partisipasi terendah di Provinsi Jawa Barat. Di samping itu, persentase tersebut juga belum memenuhi target partisipasi nasional yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, yaitu sebesar 77,5 persen pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 (Tim Redaksi Info Bekasi, 2024).

Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilukada 2024



Sumber: KPU Kota Bekasi (2024), diolah oleh peneliti.

Rendahnya angka partisipasi pemilih tersebut menunjukkan adanya berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan dinamika politik yang berkembang di lingkungan lokal. Keadaan tersebut mengisyaratkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih komprehensif guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu (Norris, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Bekasi Utara, mengingat wilayah tersebut memiliki jumlah pemilih yang relatif besar serta karakteristik sosial masyarakat yang beragam, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilukada.

Tabel 1. 1 Data DPT dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Bekasi Utara

Tahun	DPT	Pengguna Hak Pilih
2018	202.345	147.324
2024	247.818	142.002

Sumber: KPU Kota Bekasi, diolah oleh peneliti.

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Bekasi Utara pada periode Pemilukada 2018 hingga 2024. Meskipun jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami peningkatan, kondisi tersebut tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Fenomena penurunan partisipasi ini juga dapat diamati secara lebih spesifik di Kelurahan Kaliabang Tengah, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Bekasi Utara sekaligus menjadi lokasi penelitian.

Kelurahan Kaliabang Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah pemilih yang cukup besar serta karakteristik penduduk yang beragam. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari perbedaan latar belakang sosial, tingkat pendidikan, hingga jenis mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Kaliabang Tengah sebagai lokasi yang dinilai representatif untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan sosialisasi Pemilukada terhadap terbentuknya persepsi masyarakat.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2018 mencapai 81,1 persen. Persentase tersebut berasal dari 41.400 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 51.010 orang. Akan tetapi, pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 angka partisipasi mengalami penurunan menjadi 58,2 persen, meskipun jumlah DPT meningkat menjadi 69.917 pemilih. Sementara itu, jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih pada Pilkada Tahun 2024 tercatat sebanyak 40.752 orang (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, 2024).

Tabel 1. 2 Tabel Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Kelurahan Kaliabang Tengah Tahun 2018 dan 2024

Tahun	DPT	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
2018	51.010	41.400	81,1%

2024	69.917	40.752	58,2%
------	--------	--------	-------

Sumber: KPU Kota Bekasi (2024), diolah oleh peneliti.

Penurunan partisipasi sebesar 22,9 persen tersebut menjadi dasar empiris pemilihan Kelurahan Kaliabang Tengah sebagai lokasi penelitian serta menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. (Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah pemilih yang terdaftar dengan realisasi penggunaan hak pilih di masyarakat. Secara teoritis, peningkatan jumlah pemilih seharusnya berpotensi meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan bahwa peningkatan jumlah DPT tidak diikuti oleh peningkatan penggunaan hak pilih.

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui beragam media serta metode komunikasi memiliki potensi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan sosialisasi menjadi salah satu aspek yang penting untuk diteliti karena dapat memengaruhi cara masyarakat menerima, memahami, serta memberikan penilaian terhadap informasi mengenai kepemiluan.

Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat mengenai tahapan, prosedur, serta pentingnya Pemilu. Kualitas pelaksanaan sosialisasi tersebut diperkirakan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap informasi yang diterima. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan sosialisasi, semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Efektivitas sosialisasi pemilu menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Ermila Rustiani Andolo, 2022).

Menurut Almond dan Verba (1963), sosialisasi politik merupakan suatu proses yang membentuk orientasi, nilai, serta sikap politik individu melalui berbagai agen, seperti keluarga, lembaga pendidikan, media massa, dan institusi politik. Dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan sosialisasi yang berjalan secara efektif mampu meningkatkan pemahaman politik masyarakat melalui penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Pada penelitian ini, pengukuran sosialisasi tidak didasarkan pada tingkat partisipasi pemilih, tetapi berfokus pada penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menyelenggarakan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tahapan, mekanisme, serta pentingnya keterlibatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui beragam pendekatan, baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka maupun dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi.

Sasaran kegiatan meliputi berbagai unsur masyarakat, antara lain pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, penyandang disabilitas, jurnalis, serta masyarakat umum. Berbagai upaya tersebut bertujuan agar informasi mengenai kepemiluan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, mudah dipahami, serta mendorong penggunaan hak pilih secara tepat, sadar, dan bertanggung jawab (Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi., 2024). Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi selama tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3 Dataset Yang Dilakukan KPU Dalam Rangka Pemilukada Serentak 2024

No.	Tanggal	Kegiatan	Sasaran/Peserta
-----	---------	----------	-----------------

1	08/05/2024	Sosialisasi pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	Partai politik, ormas, organisasi keagamaan, dan kepemudaan
2	05/06/2024	Sosialisasi Pemilukada bagi pemilih perempuan	Perwakilan partai politik, ormas, dan LSM perempuan
3	14/06/2024	Sosialisasi dan expose tahapan Pemilukada	Jurnalis media cetak, online, dan elektronik
4	17/07/2024	Sosialisasi dan pendidikan pemilih	Guru SMA/SMK Negeri se-Kota Bekasi
5	25/07/2024	Pendidikan politik bagi pemilih pemula	Pelajar SMA/SMK
6	26/07/2024	Dialog publik peran media dalam Pemilukada	Wartawan dan media massa
7	27/07/2024	Sosialisasi Pemilukada	Tokoh lintas agama dan masyarakat
8	29/07/2024	Rapat koordinasi persiapan pencalonan kepala daerah	Stakeholder pemerintah dan penyelenggara
9	31/07/2024	Pendidikan politik bagi pemilih pemula	Pelajar Kecamatan Rawalumbu
10	07/08/2024	Sosialisasi dan pendidikan pemilih	Guru sekolah swasta se-Kota Bekasi
11	07/08/2024	Focus Group Discussion integritas calon kepala daerah	Akademisi, media, dan masyarakat
12	22/08/2024	Pendidikan pemilih	Guru SMK swasta se-Kota Bekasi
13	02/09/2024	Pendidikan politik	Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bekasi
14	10/09/2024	Podcast pendidikan pemilih pemula	Siswa SMA Ananda Bekasi
15	13/09/2024	Diskusi Pemilukada dan peluncuran buku	Akademisi dan mahasiswa

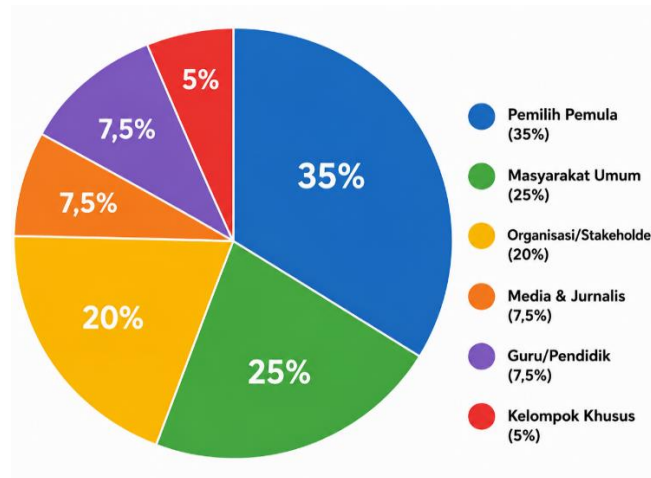
16	19/09/2024	Pendidikan politik mahasiswa baru	Mahasiswa
17	21/09/2024	Sosialisasi Pemilukada	Siswa SMK Patriot Bekasi
18	02/10/2024	Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Siswa SMAN 19 Bekasi
19	03/10/2024	Ngopi Bareng KPU (Sosialisasi kewilayahan)	Masyarakat kecamatan se-Kota Bekasi
20	03/10/2024	Program bincang santai Radar Bekasi	Masyarakat umum
21	11/10/2024	Bincang santai Pemilukada	Kelompok perempuan dan masyarakat
22	14/10/2024	Pendidikan pemilih	Siswa SMAN 4 Bekasi
23	18/10/2024	Materi pemungutan suara di TPS	Pemilih pemula MAN 2 Bekasi
24	20/10/2024	Pendidikan pemilih penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas
25	21/10/2024	Pendidikan pemilih pemula	Siswa SMAN 14 Bekasi
26	22/10/2024	Nonton bareng di Pesantren Baitul Mukmin	Santri
27	23/10/2024	Sosialisasi kewilayahan	Masyarakat Bantargebang, Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati
28	24/10/2024	Sosialisasi PKPU Nomor 2 Tahun 2024	Mahasiswa dan organisasi
29	21–26/10/2024	Festival Demokrasi	Siswa SMA/SMK sederajat
30	28/10/2024	Nonton bareng film "Tepatilah Janji"	Mahasiswa
31	30/10/2024	Sosialisasi kewilayahan	Masyarakat Rawalumbu dan Bekasi Barat

32	03/11/2024	Senam Sehat Dantain Pemilukada 2024	Masyarakat Kota Bekasi
33	04/11/2024	Touring Demokrasi Road to 27 November 2024	Masyarakat Jatisampurna
34	08/11/2024	Sosialisasi Pemilukada Serentak	Warga binaan Lapas, PWI, dan KNPI
35	11/11/2024	Sosialisasi pemilih pemula	Siswa SMAN 15 Bekasi
36	11/11/2024	Sosialisasi bersama Pemerintah Kota Bekasi	Tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan
37	14/11/2024	Sosialisasi Pemilukada	PD KAMMI, PMII, dan GMKI Kota Bekasi
38	16/11/2024	Sosialisasi Pemilukada	HMI, Fatayat NU, dan GMNI Kota Bekasi
39	20/11/2024	Sosialisasi Pemilukada Serentak	Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia Kota Bekasi
40	25/11/2024	Sosialisasi Pemilukada Serentak	Kelompok Pengelola Sampah Bantargebang, JPPR, dan IMM Kota Bekasi

Sumber: KPU Kota Bekasi (2024), diolah oleh peneliti.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi sasaran kegiatan sosialisasi Pemilukada yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi selama tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, data pada Tabel 1.3 kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori sasaran utama dan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian dalam bentuk visual ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai proporsi sasaran sosialisasi yang menjadi fokus KPU Kota Bekasi selama pelaksanaan tahapan Pilkada.

Gambar 1. 2 Persentase Sasaran Sosialisasi Pemilukada KPU Kota Bekasi Tahun 2024



Sumber: KPU Kota Bekasi (2024), diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Gambar 1.2, sasaran sosialisasi terbesar ditujukan kepada pemilih pemula dengan persentase sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi memberikan perhatian yang cukup besar kepada generasi muda sebagai pemilih baru agar memiliki pemahaman mengenai proses demokrasi, tahapan Pilkada, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selanjutnya, masyarakat umum menjadi sasaran sebesar 25%, diikuti oleh organisasi dan stakeholder sebesar 20%. Adapun sasaran media dan jurnalis serta guru atau pendidik masing-masing memperoleh proporsi sebesar 7,5%, sedangkan kelompok khusus, seperti perempuan, penyandang disabilitas, santri, dan warga binaan, memperoleh proporsi sebesar 5%.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa strategi sosialisasi KPU Kota Bekasi tidak hanya berfokus pada satu kelompok masyarakat, tetapi juga menjangkau berbagai elemen yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kepemiluan. Meskipun demikian, proporsi terbesar yang diberikan kepada pemilih pemula mengindikasikan bahwa kelompok ini dipandang sebagai sasaran prioritas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Namun, intensitas pelaksanaan sosialisasi tersebut belum tentu menghasilkan persepsi yang sama pada setiap individu. Perbedaan karakteristik masyarakat, seperti usia, tingkat pendidikan, pengalaman politik, serta akses terhadap informasi dapat

memengaruhi cara masyarakat menerima, memahami, dan menilai pelaksanaan sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada oleh KPU Kota Bekasi berpengaruh terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.

Dalam penelitian ini, konsep Sosialisasi Pemilukada mengacu pada teori komunikasi massa Denis McQuail yang menekankan bahwa efektivitas penyampaian informasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan, kredibilitas sumber, media yang digunakan, serta keterjangkauan informasi kepada khalayak (Wahid, 2022). Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kualitas pelaksanaan sosialisasi Pemilukada oleh KPU kepada masyarakat. Menurut Bimo Walgito (2010), persepsi merupakan suatu proses psikologis yang diawali dengan diterimanya stimulus melalui pancaindra, kemudian informasi tersebut diolah, diorganisasikan, ditafsirkan, dan dievaluasi sehingga membentuk penilaian terhadap suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini, stimulus yang dimaksud adalah kegiatan sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi.

Berdasarkan teori tersebut, kualitas pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada diperkirakan memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat (Wibowo, 2021). Informasi yang disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses akan lebih mudah diterima serta diolah oleh masyarakat sehingga membentuk persepsi yang lebih positif terhadap pelaksanaan sosialisasi. Fenomena tersebut juga terlihat di Kelurahan Kaliabang Tengah yang merupakan bagian dari Kecamatan Bekasi Utara. Wilayah ini mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pemilihan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, tetapi juga berkaitan dengan proses penyampaian informasi pemilu serta bagaimana informasi tersebut dipahami dan dimaknai oleh masyarakat.

Meskipun penelitian ini diawali dengan fenomena rendahnya tingkat partisipasi pemilih, penelitian ini tidak mengkaji partisipasi sebagai variabel penelitian. Fenomena tersebut digunakan sebagai dasar empiris untuk mengkaji pelaksanaan Sosialisasi

Pemilukada dan hubungannya dengan Persepsi Masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, kajian mengenai pengaruh Sosialisasi Pemilukada terhadap Persepsi Masyarakat pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan dengan menjadikan Sosialisasi Pemilukada sebagai variabel independen dan Persepsi Masyarakat sebagai variabel dependen yang dianalisis menggunakan teori komunikasi Denis McQuail serta teori persepsi Bimo Walgito. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjelaskan proses penerimaan stimulus, pengolahan dan pengorganisasian informasi, serta tahapan interpretasi dan evaluasi yang membentuk persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan sosialisasi Pemilukada di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kualitas pelaksanaan sosialisasi, yang mencakup kejelasan informasi, kredibilitas sumber, daya tarik media, serta kemudahan akses terhadap informasi, memiliki pengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat mengenai sosialisasi Pemilukada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan kajian komunikasi politik, sekaligus memberikan manfaat secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam merancang strategi sosialisasi Pemilukada yang lebih efektif, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat, sehingga efektivitas penyampaian informasi kepemiluan pada penyelenggaraan Pemilukada di masa mendatang dapat terus ditingkatkan (Zulfikar, 2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi?

2. Seberapa besar pengaruh Sosialisasi Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.
2. Menganalisis besarnya pengaruh Sosialisasi Pemilukada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik yang berkaitan dengan kajian komunikasi politik, sosialisasi Pemilukada, dan persepsi masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi ilmiah mengenai pengaruh sosialisasi Pemilukada terhadap terbentuknya persepsi masyarakat serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang atau topik yang sejenis.

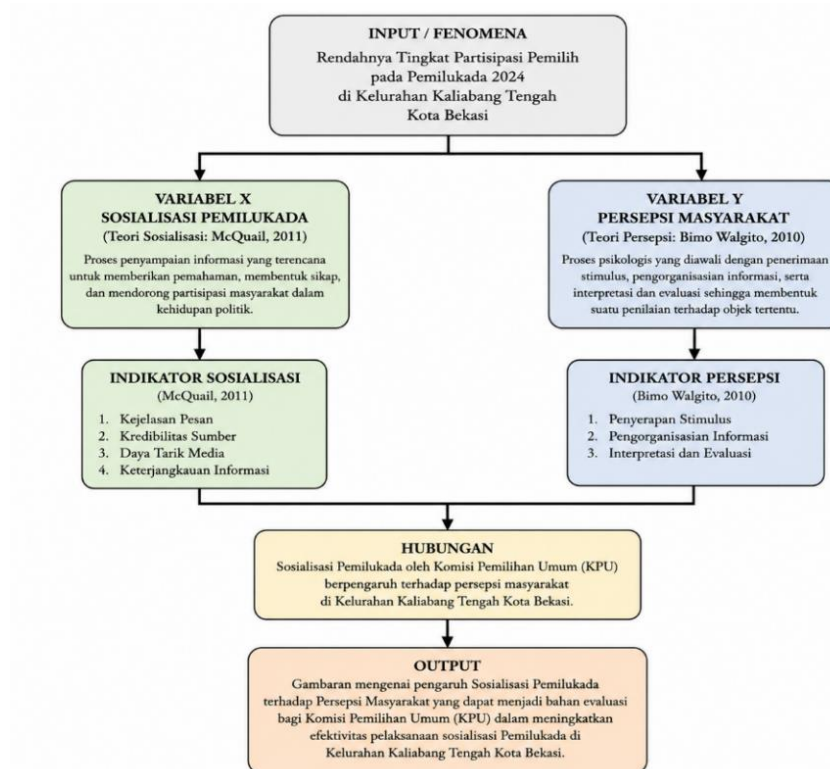
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya KPU Kota Bekasi, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi Pemilukada. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi sosialisasi yang lebih efektif, komunikatif, dan selaras dengan karakteristik masyarakat sehingga dapat

membentuk persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap pelaksanaan sosialisasi Pemilukada.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir



SUNDAH BANDUNG
Sumber: Peneliti (2026)

Kerangka berpikir pada penelitian ini disusun berdasarkan anggapan bahwa pelaksanaan sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat. Dalam penelitian ini, sosialisasi ditempatkan sebagai variabel independen (X) karena berfungsi sebagai proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilukada. Sementara itu, persepsi masyarakat diposisikan sebagai variabel dependen (Y) yang menggambarkan hasil dari proses penerimaan, pengolahan, serta interpretasi terhadap informasi yang telah diterima.

Menurut teori sosialisasi yang dikemukakan oleh Denis McQuail, efektivitas penyampaian informasi dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu kejelasan pesan, kredibilitas sumber, daya tarik media, dan keterjangkauan informasi. Keempat aspek tersebut menjadi indikator dalam menilai pelaksanaan sosialisasi Pemilukada oleh KPU. Apabila sosialisasi dilaksanakan dengan penyampaian pesan yang jelas, didukung oleh sumber informasi yang terpercaya, memanfaatkan media komunikasi yang menarik, serta mudah dijangkau oleh masyarakat, maka informasi yang diterima diharapkan mampu membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai penyelenggaraan Pemilukada.

Selanjutnya, berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh Bimo Walgito, persepsi merupakan proses psikologis yang diawali dengan penerimaan stimulus, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian informasi serta interpretasi dan evaluasi terhadap informasi tersebut hingga terbentuk suatu pemahaman atau penilaian terhadap objek tertentu. Dalam penelitian ini, stimulus yang dimaksud adalah informasi mengenai Pemilukada yang disampaikan melalui kegiatan sosialisasi oleh KPU. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan sosialisasi diperkirakan akan memengaruhi proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan sosialisasi Pemilukada.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa pelaksanaan sosialisasi Pemilukada yang semakin baik akan diikuti oleh persepsi masyarakat yang semakin positif. Sebaliknya, apabila pelaksanaan sosialisasi belum mampu menyampaikan informasi secara efektif, maka persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan sosialisasi Pemilukada juga cenderung kurang positif. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis besarnya pengaruh Sosialisasi Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.

F. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan landasan teori serta temuan dari penelitian

terdahulu. Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan benar sebelum dilakukan pembuktian melalui proses pengumpulan data dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, hipotesis disusun untuk menguji pengaruh Sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai variabel independen (X) terhadap Persepsi Masyarakat sebagai variabel dependen (Y) di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi.

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Persepsi Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi.

